

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Kecamatan Teluk Pandan



Kecamatan Teluk Pandan
Alamat : Jl.Poros Sangatta - Samarinda, Teluk Pandan,Kutim
E-mail : telukpandankec@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKJIP Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Teluk Pandan selama tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat perencanaan Kinerja, pengukuran dan capaian kinerja,realisasi anggaran, serta evaluasi kinerja Kecamatan Teluk Pandan selama Tahun 2025. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Teluk Pandan, 7 Januari 2026
Camat



Anwar, S.Pd
NIP. 19690923 199306 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan umum organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Anggaran.....	10
1.3 Isu strategis perangkat Daerah	11
1.4 Landasan Hukum	12
1.5 Sistematika	12
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Starategis	Error! Bookmark not defined.
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2026	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja	34
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	35
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	35
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	37
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	38
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	40

3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	41
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	43
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	44
3.2	Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV		58
PENUTUP		58
LAMPIRAN		59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025....	18
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2026	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah.....	24
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	35
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	35
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	37
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	38
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	40
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	41
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	43
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	45
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Teluk Pandan disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

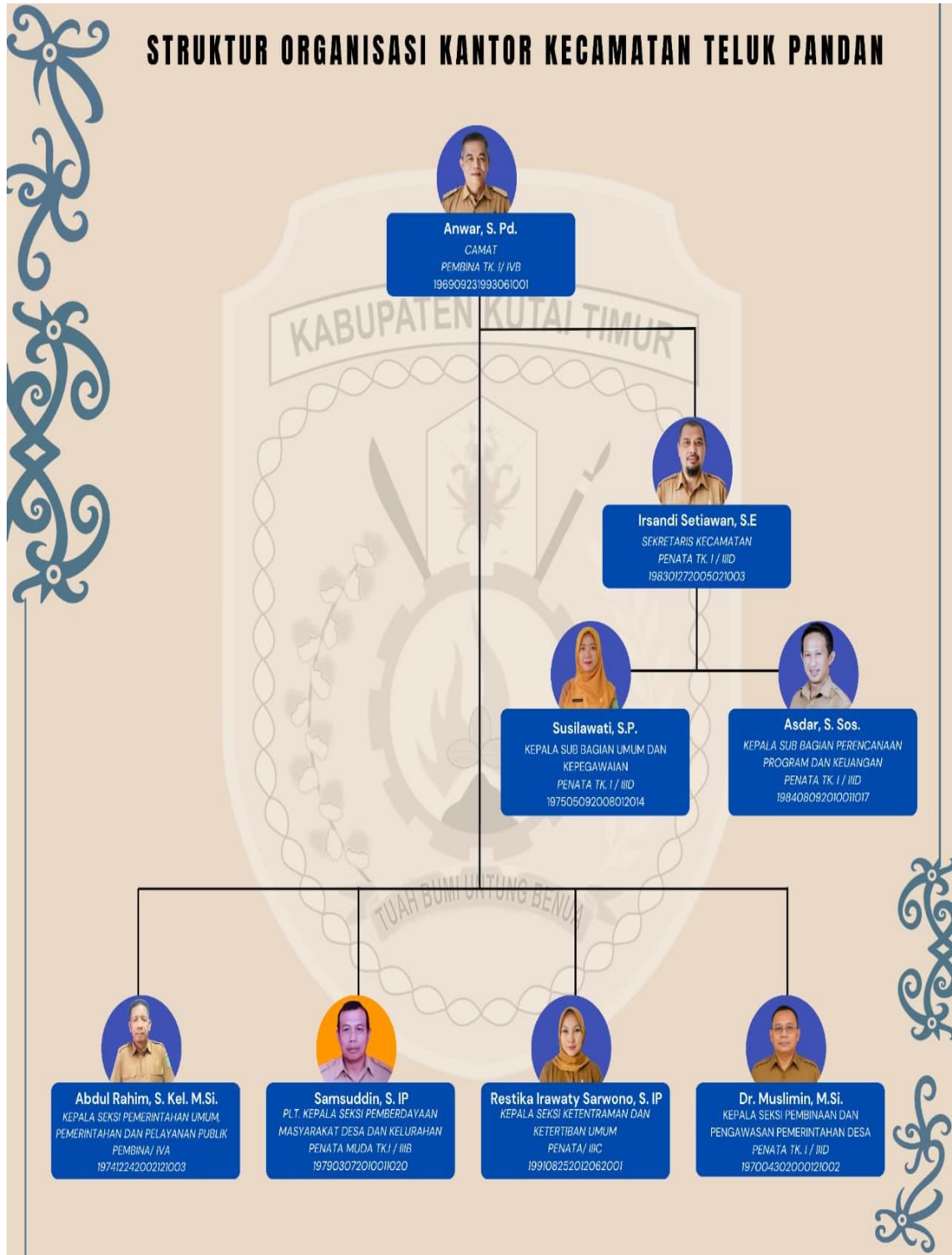
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Teluk Pandan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan umum organisasi

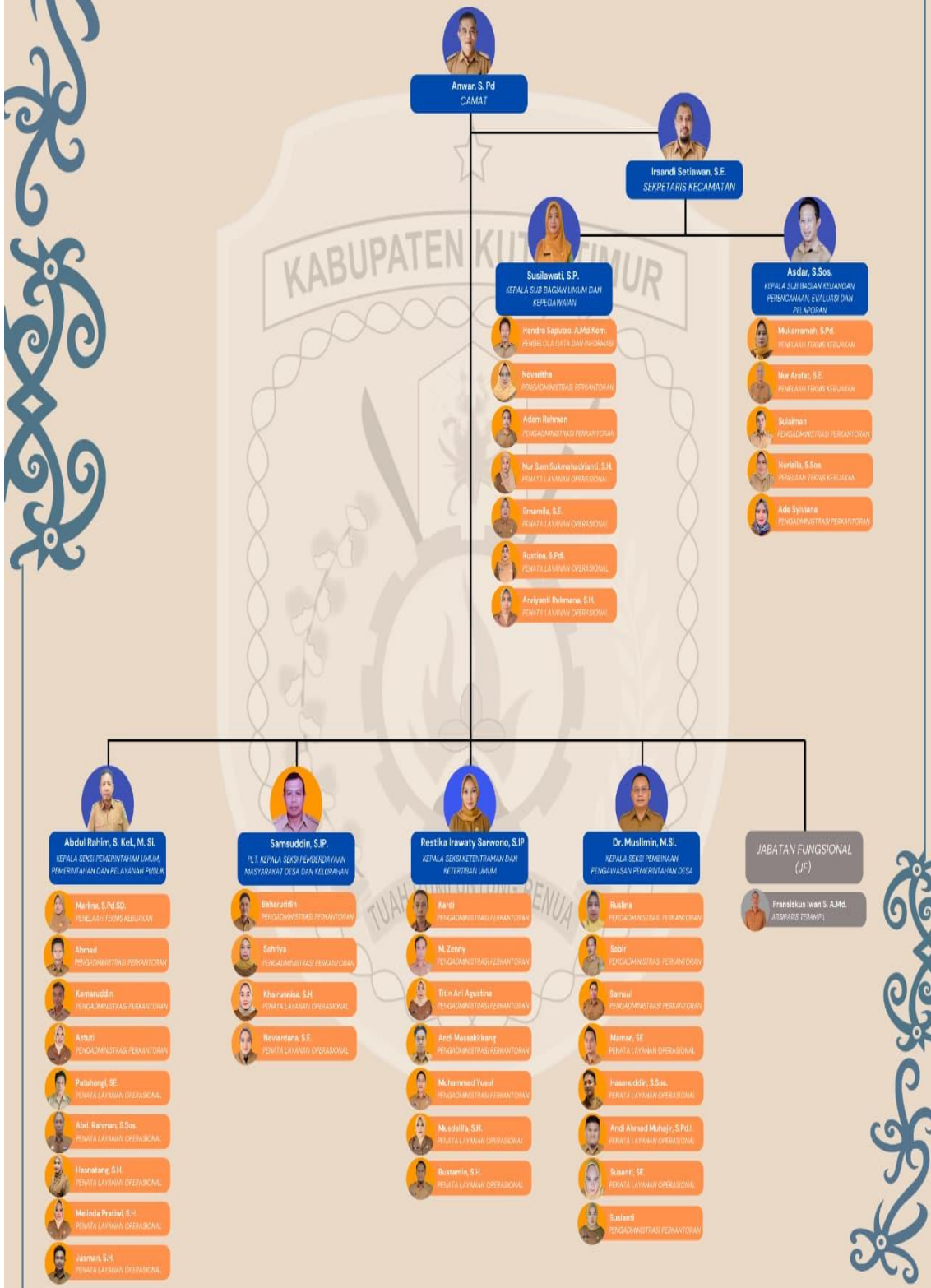
1.2.1 Struktur Organisasi

1.1 Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Pandan



Sumber Umpeg Kecamatan Teluk Pandan

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TELUK PANDAN



Sumber Umpeg Kecamatan Teluk Pandan

Kecamatan Teluk Pandan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kutai Timur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Kecamatan Teluk Pandan mempunyai tugas :

1. Camat mempunyai Tugas :

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;

- f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat mempunyai tugas, yaitu :

- a) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- b) sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Camat.
- c) sekretariat membawahkan sub bagian yang di pimpin oleh seorang Kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.
- d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

- e) Sub Bagian Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta aset, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Seksi Pemerintahan umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b) koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait;
- c) peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h) koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i) koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- k) pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- l) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan;
- n) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- o) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati;
- p) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- q) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- r) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- s) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- t) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u) pengembnagan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- v) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak di laksanakan oleh instansi vertikal; dan
- w) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- c) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- d) peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e) kegiatan pemberdayaan keluarahan;
- f) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- g) pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- h) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- i) evaluasi keluarahan;
- j) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
- k) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- l) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- m) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- n) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- o) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- p) koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM);
- q) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- b) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- c) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d) koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Bupati; dan
- e) koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- d) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa;
- i) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- j) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- k) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

- l) fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o) fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa;
- q) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- r) koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- s) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Teluk Pandan. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Teluk Pandan.

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Teluk Pandan. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Teluk Pandan :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2024	Rp 9.757.658.860
APBD	Tahun 2025	Rp 9.528.828.542
Sumber Lainnya (Jika Ada)		

Sumber : DPA Kecamatan Teluk Pandan

1.3 Isu strategis perangkat Daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari :

- a. Pembangunan Sarana Teluk Pandan kurang dan maksimal Prasarana di Kecamatan dikarenakan alokasi anggaran sangat minim ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat
- d. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
6. Surat Edaran Menpan RB No.5 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
7. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
8. Perbup Kutai Timur No.26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan tata cara Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dasar hukum dan sistematika laporan kinerja Kecamatan Teluk Pandan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana strategis

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dan stackholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu

Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis sektor pertanian

Misi 3 : Mewujudkan pelayanan Dasar Bagi Masyarakat secara proporsional dan Merata

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Teluk Pandan mengacu pada Misi ke 3 (tiga) dan 5 (lima), yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan pelayanan Dasar Bagi Masyarakat secara proporsional dan Merata

Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

3. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat			Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Teluk Pandan	5	6	8	9	10
		1.1	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Teluk Pandan	5	6	8	9	10
2	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Teluk Pandan	17	20	22	24	26
		2.1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	17	20	22	24	26

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Teluk Pandan					
3	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan	89%	92%	100%	100%	100%
		3.1	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan	89%	92%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Teluk Pandan Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Pandan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	1.1.2.#.1	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
1.1.1.1	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan Masyarakat	1.1.1.1#0.1	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya ketahanan nasional	(Jumlah Pembinaan yang direncanakan/jumlah Pembinaan yang dilaksanakan)x100%	Kasi PUP3
1.3.1	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata						
1.4.1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	1.4.3.#.1	Indeks Pembangunan Desa (IPD)				
1.4.2	Meningkatkan Nasionalisme	1.4.2#.1	Jumlah Pembinaan		Pembinaan Wawasan	(Jumlah kegiatan	Kasi Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitung an	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Persatuan Masyarakat		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		kebangsaan Dan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras Dan Golongan Lainnya	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan) x 100 %	ahan Umum
1.4.3	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	1.4.3#. 1	Indeks Pembangunan Desa		Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu desa. IPD mencakup berbagai dimensi pembangunan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Definisi operasional IPD dapat bervariasi		Pendamping P3T

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitung an	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					tergantung pada metode atau pedoman yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Umumnya, IPD mencakup indikator-indikator seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan.		
1.4.3.1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	1.4.3.1#0.1	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Laporan	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayahnya	IPD = Nilai IPD setiap desa	RPJMD

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2026

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2026 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah

Tahun 2026. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2026 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2026 Kecamatan Teluk Pandan

No	Program/ Kegiatan	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	18.000.000
			1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	10.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	53	5.095.490. 826
			1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	20.000.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	20.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit	2	10.000.000
			1.7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	15.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Paket	2	40.000.000
			1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	255.000.00 0
			1.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	10	50.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	100.000.000
			1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa dan pelayanan umum yang disediakan	Laporan	1	72.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paiak Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan vang di pelihara	Unit	9	50.000.00

		Urusan Pemerintahan Daerah		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan pajaknya			
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	15	15.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	10.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGA-RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	10.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasya- rakatan	10	20.000.000
			3.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10.000.000
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.3	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	50	100.000.000
			3.4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	50	100.000.000
			3.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	50	100.000.000
			3.6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	50	100.000.000

			3.7	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50	100.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15.000.000
			4.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	25.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	260	130.000.000
			5.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	85	25.000.000
			5.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	10.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	6	10.000.000
			6.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	6	10.000.000
			6.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	6	10.000.000
			6.4	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	6	10.000.000
			6.5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10.000.000

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kecamatan Teluk Pandan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Jumlah pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Teluk Pandan	9
2	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Teluk Pandan	24 Pelayanan
		Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan	100%
		Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan Teluk Pandan	0 Pelanggaran
		Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Teluk Pandan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Teluk Pandan:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Profesionalitas ASN	77 67.65
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	8
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Administrasi Kepegawaian	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
1.8.1	enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan prima diwilayah kecamatan	98
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1
2.1.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
2.1.3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan	92
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1
3.2.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50
3.2.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50
3.2.3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	35
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya laporan koordinasi	95

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		ketentram dan ketertiban umum	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80
5.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya laporan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	92

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6
6.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6
6.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Teluk Pandan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluk Pandan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Teluk Pandan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pandan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Jumlah pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Teluk Pandan	9	9	100	Sangat Tinggi	Kasi PUP3
2	Meningkatnya Status Kemajuan dan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan	24	24	100	Sangat Tinggi	Kasi PUP3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kemandirian Desa	Publik Teluk Pandan					
2.1		Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan	95	80	84	Tinggi	Kasi PMDK
2.2		Jumlah Pelanggaran PERDA/PERK ADA Kecamatan Teluk Pandan	100	100	100	ST	Kasi Trantibum
2.3		Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Teluk Pandan	100	100	100	ST	Kasi P3d
3	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan	95	95	100	ST	Kasubag Keuangan

Sumber : Evdoren Kecamatan Teluk Pandan

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indkator Kinerja, yang mana Target yang ingin di capai di tahun 2025 dapat terealisasi dengan capaian rata-rata 100% dengan Kategori sangat tinggi yang di peroleh

dari Sumber Kasi Pemerintahan Umum, Pemerintahan, dan Pelayanan Publik, Kasi Pemberdayaan masyarakat dan desa, Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa, Kasi Trantibum, Kasubag Keuangan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		% Capaian
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Jumlah pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional Teluk Pandan			5	9	9	100
2	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Teluk Pandan			8	24	24	100
2.1		Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan			65	95	80	84
2.2		Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan Teluk Pandan			100	100	100	100
2.3		Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga			100	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		% Capaian
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kemasyarakatan Teluk Pandan						
3	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan			71.32	95	95	100

Sumber : Evdoren Kecamatan Teluk Pandan

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Tujuan dari Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat, Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan masyarakat dan Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata dapat target dapat terealisasi dengan capaian 100%.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Teluk Pandan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatn ya Wawasan Kebangsaan serta	Jumlah pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan	9	9	100

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Ketahanan Nasional Teluk Pandan			
2	Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Teluk Pandan	24	24	100
		Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan	80	95	84
		Jumlah Pelanggaran PERDA/PERK ADA Kecamatan Teluk Pandan	100	100	100
		Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Teluk Pandan	100	100	100
3	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan	95	95	100

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas, target capaian Tahun 2025 mengalami kemajuan yang signifikan.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Jumlah pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Teluk Pandan	9		100
2.	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Teluk Pandan	24		100
		Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan	80		84
		Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	100		100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		Kecamatan Teluk Pandan			
		Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Teluk Pandan	100		100
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan	95		100

Sumber : Renstra Kecamatan Teluk Pandan

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Jumlah pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Teluk Pandan	9	9	100		
2	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Teluk Pandan	24	24	100		
		Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan	95	80	84		
		Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan Teluk Pandan	100	100	100		
		Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100	100	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atan Teluk Pandan					
3	Meningka tka tata kelola organisasi pemerin- tah yang baik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Teluk Pandan	95	95	100		

Sumber : Renstra Kecamatan Teluk Pandan

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa capaian realisasi dari 3 Tujuan dapat tercapai 100 %

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatn ya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	9	9	100	254.532.480	246.048.000	96.67	1,00
2	Meningkatn ya Status Kemajuan	24	24	100	67.308.520	62.450.000	92.78	1,00

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Kemandirian Desa							
		95	80	84	185.917.000	137.446.000	73.93	1,00
		100	100	100	35.214.000	35.004.000	99.40	1,00
		100	100	100	84.978.000	83.989.173	98.84	1,00
3	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	95	95	100	8.900.878.542	7.467.213.657	83.89	1,00

Sumber : Sub Bagian Keuangan Kecamatan Teluk Pandan

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran nilai efisiensi tujuan/sasaran adalah 1,00 %

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat nya Wawa- san Kebangsaa n serta Persa-tuan dan Kesa- tuan Masyaraka t	Jumlah pembina- an Wawa- san Kebangsaa n dan Ketaha- nan Nasional Teluk Pandan	100	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Menunja ng	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Menunja ng	
2	Meningkat nya Status Kemaju-an dan Kemandiri an	Jumlah Penyelengga raan Pelaya- nan Publik Teluk Pandan	100	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	Menunja ng	
			100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pelayanan prima diwilayah kecamatan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Menunja ng	
			100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	100	Menunja ng	

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kepada Camat Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kepada Camat Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
			84	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan	84	Menunja ng	
			84	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	84	Menunja ng	
			84	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	84	Menunja ng	
			100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	100	Menunja ng	
			100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunaj ng	
			100	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunja ng	

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100	Menunja ng	
			100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi,Rekome ndasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunja ng	
3	Mening- katkan tata kelola organi-sasi pemerin- tah yang baik	Caku-pan Pelaya-nan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuan-gan Kec. Teluk Pandan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100	Menunja ng	
			100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunja ng	
			100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunja ng	
			100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunja ng	
			100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunja ng	
				Administrasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi	100	Menunja ng	

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunja ng	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunja ng	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunja ng	

Sumber : Sub Bagian Keuangan Kecamatan Teluk Pandan

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata Capaian Indikator mencapai 100 % dan menunjang.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	254.532.480	246.048.000	96.67
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	254.532.480	246.048.000	96.67
1.1. 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	236.319.520	229.858.000	97.27
1.1. 2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	8.457.960	8.070.000	95.41

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lokal, Regional, dan Nasional			
1.1. 3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.755.000	8.120.000	83.24
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.308.520	62.450.000	92.78
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	47.128.520	46.140.000	97.90
2.1. 1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.128.520	46.140.000	97.90
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	11.765.000	8.260.000	70.21
2.2. 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11.765.000	8.260.000	70.21

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.415.000	8.050.000	95.66
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.415.000	8.050.000	95.66
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	185.917.000	137.446.000	73.93
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.680.000	35.991.000	65.82
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.066.00	21.051.000	99.93
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.614.000	14.940.000	44.45
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	131.237.000	101.455.000	77.31
3.2.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	84.850.000	64.385.000	75.88

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
3.2. 2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	46.387.000	37.070.000	79.91
3.2. 3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.214.000	35.004.000	99.40
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.850.000	20.760.000	99.57
4.1. 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.435.000	12.360.000	99.40
4.1. 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.415.000	8.400.000	99.82

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.364.000	14.244.000	99.16
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.364.000	14.244.000	99.16
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84.978.000	83.989.173	98.84
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.978.000	83.989.173	98.84
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.425.000	10.389.000	99.65
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.455.000	15.936.000	96.85
5.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.415.000	8.400.000	99.82

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	21.463.000	21.193.173	98.74
5.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.785.000	15.693.000	99.42
5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12.435.000	12.378.000	99.54
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.900.878.542	7.467.213.657	83.89
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.213.700	40.518.000	62.13
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.353.700	19.308.000	45.59
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.860.000	21.210.000	92.78
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.693.084.742	6.426.880.091	83.54

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.501.764.742	6.262.280.091	83.48
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.225.000	153.560.000	85.20
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.095.000	11.040.000	99.50
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.755.000	9.560.000	98.00
6.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.755.000	9.560.000	98.00
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.832.000	11.016.000	93,10
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
6.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.832.000	11.016.000	93.10
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.992.000	226.540.445	76.28
6.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.297.000	35.365.000	76.39
6.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.296.000	2.191.500	13.45

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.5. 3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.850.000	11.696.000	98.70
6.5. 4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	116.500.000	81.810.000	70.22
6.5. 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.594.000	83.117.945	92.77
6.5. 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.455.000	12.360.000	75.11
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.377.300	243.498.150	92.10
6.6. 1	Pengadaan Mebel	93.128.000	87.422.196	93.87
6.6. 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.249.300	156.075.954	91.14
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.063.800	469.635.861	94.86
6.7. 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	71.599.061	74.58
6.7. 2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.063.800	398.036.800	99.74
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.560.000	39.565.110	61.28
6.8. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	54.810.000	30.870.860	56.32

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
6.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000	8.694.250	89.17
6.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0

Sumber : Sub Bagian Keuangan Kecamatan Teluk Pandan

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Teluk Pandan yang terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan, 41 Sub Kegiatan. Rata-rata Capaian sub kegiatan mendekati 100 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Teluk Pandan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Teluk Pandan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Teluk Pandan memiliki 3 sasaran strategis dengan 3 sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat kinerja Kecamatan Teluk Pandan adalah Sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran terbatas, koordinasi lintas sektor belum optimal
3. Faktor Keberhasilan Kinerja Kecamatan Teluk Pandan adalah kepemimpinan camat yang efektif, komitmen aparatur terhadap pelayanan publik, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Teluk Pandan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur
2. Penguatan sarana dan prasarana pelayanan
3. Optimalisasi pelayanan publik

4. Penguatan perencanaan dan pengelolaan program.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Teluk Pandan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Teluk Pandan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .